

ANALISIS HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN KONSERVASI MELALUI PERUBAHAN BLOK PERLINDUNGAN MENJADI BLOK KHUSUS UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS

Oleh

Dhafin Faza Irianto, NIM 1914101075

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kawasan hutan konservasi yang dialihfungsikan menjadi blok khusus untuk kepentingan strategis, serta mengkaji akibat hukum dari keberlakuan frasa “blok khusus” dalam Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 yang menimbulkan konflik norma dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi kawasan hutan konservasi seringkali dilakukan atas nama proyek strategis nasional, seperti yang terjadi dalam kasus pembangunan Jalan Tol Balikpapan–Samarinda di kawasan Tahura Bukit Soeharto. Kebijakan tersebut didasarkan pada pemanfaatan frasa “blok khusus” dalam PP No. 28 Tahun 2011, yang memberikan celah hukum untuk merubah fungsi kawasan hutan konservasi. Padahal, ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Konflik norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan prinsip negara hukum, dan mengancam kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Kawasan Hutan Konservasi, Blok Khusus, Konflik Norma, Proyek Strategis, Perlindungan Hukum.

**LEGAL ANALYSIS OF THE CONVERSION OF CONSERVATION FOREST
AREAS THROUGH THE RECLASSIFICATION OF PROTECTION BLOCKS
INTO SPECIAL BLOCKS FOR STRATEGIC INTERESTS**

By

Dhafin Faza Irianto, NIM 1914101075

Law Departement

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal protection of conservation forest areas that have been converted into special blocks for strategic interests, and to examine the legal implications of the phrase "special block" as stated in Article 19 Paragraph (1) Letter C of Government Regulation Number 28 of 2011, which creates a normative conflict with higher-level legislation. This study is a normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary sources, analyzed through a descriptive-analytical method. The results show that the conversion of conservation forest areas is often justified under the banner of national strategic projects, as reflected in the case of the Balikpapan–Samarinda Toll Road construction in the Bukit Soeharto Grand Forest Park (Tahura). This policy relies on the use of the "special block" clause in Government Regulation No. 28 of 2011, which creates a legal loophole allowing the repurposing of conservation forest areas. However, such a provision contradicts Law Number 41 of 1999 on Forestry and Law Number 5 of 1990 on the Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems. This normative conflict results in legal uncertainty, undermines the principle of the rule of law, and poses a threat to environmental sustainability.

Keywords: *Conservation Forest Area, Special Block, Norm Conflict, Strategic Project, Legal Protection.*